

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di dalam era globalisasi sekarang ini, pertanggungjawaban tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai, terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan khususnya daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasi laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (Laily, 2017). Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilakukan secara periodik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh handal, mengingat bahwa keterandalan merupakan salah satu unsur penting nilai informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbagai pihak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002:20)

PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi, jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan disajikan dengan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tidak akan mempercayai informasi yang disajikan.

Persaingan dalam dunia pemerintah yang dilandasi unsur politik telah mempengaruhi pimpinan pemerintah melakukan *fraud* (Kecurangan). Meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan tentang kecurangan akuntansi dan sanksi yang keras tentang pelanggaran korupsi, masih saja ditemukan kasus- kasus pelanggaran yang terjadi di Instansi Pemerintahan. Salah satu kasus yang terjadi di OPD Pati adalah kasus korupsi dana hibah yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Pati yaitu Bapak Mudasir dimana dana hibah yang dicairkan dari APBD Pati seluruhnya berjumlah Rp 1,07 miliar. Bapak Mudasir terbukti tidak merealisasikan dana sesuai dengan proposal perencanaan dan membuat laporan yang tidak sebenarnya. Dana sebesar 316 juta berhasil dikuasai oleh Mudasir yang saat itu juga menjadi bendahara Persipa Pati. Pada tanggal 1 Februari 2017 Mudasir dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan korupsi secara bersama – sama dan dijatuhkan pidana penjara dua tahun, dan denda 50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti 316 juta ([kompas.com](http://kompas.com)).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi kasus pelanggaran korupsi yang terjadi instansi pemerintahan, maka pemerintah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan pada masyarakat, serta dibutuhkan keterandalan dalam pelaporan keuangan pemerintahan dan bukti transaksi yang akurat dalam pembelanjaan anggaran daerah.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah sumber daya manusia. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat

transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi, dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada (Yadnya, dkk, 2017). Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut harus dilakukan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dibidang akuntansi. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal (Yadnya, dkk, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yadnya, dkk (2017), Hullah, dkk (2017), dan Aini (2015) menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komarasari (2017), dan Karmila, dkk (2014) menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah (Yadnya, dkk (2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yadnya, dkk (2017), Primayana, dkk (2014), Komarasari, dan Putra (2017) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Riduwan (2014), Aini (2015), dan Wardani, dkk (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan adalah pengendalian intern. Penyusunan laporan keuangan tentu saja sering terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu untuk meyakinkan stakeholder maupun publik mengenai keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik, dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan di atasi (Purwono, 2007:120). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yadnya, dkk (2017), Komarasari (2017), Aini (2015), dan Putra (2017) menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Riduwan (2014) dan Karmila, dkk (2014) menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keterandalan pemerintah.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah komitmen manajemen. Dengan adanya suatu komitmen, organisasi akan dapat berkembang seiring sejalan dalam usaha mewujudkan program organisasi. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa

komitmen manajemen akan mengandung unsur loyalitas terhadap organisasi dalam kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi (Anggraeni, dkk (2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, dkk (2015) dan Putra (2017) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Dengan adanya kasus pelanggaran penyalahgunaan dana yang terjadi di OPD Pati dan variatifnya hasil penelitian, maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Yadnya, dkk (2017), yang berjudul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yadnya, dkk (2017) adalah penelitian ini mengambil sampel pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Pati dengan menambahkan satu variabel independen yaitu komitmen manajemen. Dimana komitmen manajemen merupakan salah satu hal penting yang perlu diterapkan dalam pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal dan dengan adanya suatu komitmen, organisasi akan dapat berkembang dalam usaha mewujudkan program organisasi (Anggraeni, dkk (2015).

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas,maka dilakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN**

## **INTERN, DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PATI)”.**

### **1.2. Ruang lingkup**

Agar lebih terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami serta untuk menghindari adanya salah tafsiran terhadap maksud serta tujuan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati.
2. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Program yang bekerja di OPD Kabupaten Pati.
3. Penelitian ini fokus untuk menguji secara empiris pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan komitmen manajemen terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah di Kabupaten Pati.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada OPD kabupaten Pati ?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada OPD kabupaten Pati?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada OPD kabupaten Pati?
4. Apakah komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada OPD Pati?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah kabupaten Pati.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah kabupaten Pati.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan kabupaten Pati.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen manajemen terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan kabupaten Pati.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk melatih diri dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.

## 2. Kegunaan Praktis/Empiris

### a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati, hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai kontribusi praktik berupa masukan agar lebih memperhatikan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan komitmen manajemen.

### b. Bagi para pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai ada tidaknya pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan komitmen manajemen terhadap keterandalan pelpaoran keuangan pemerintah.

### c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menerapkan dan mengimplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi, ataupun dari sumber-sumber yang didapat.